

CONSTRUCTION OF THE TENGKU AGUNG SULTANAH LATIFAH BRIDGE AND ITS IMPACT ON SIAK REGENCY (2001-2011)

Pembangunan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah dan Dampaknya Bagi Kabupaten Siak (2001-2011)

^{1a}Rendi Saputra Bangun, ^{2b}Bunari, ^{3a}Asyrul Fikri

¹²³Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Pekanbaru, 28293, Indonesia

rendi.saputra2615@student.unri.ac.id
bunari@lecturer.unri.ac.id
asyrul.fikri@lecturer.unri.ac.id

(*)Correspondence Author
rendi.saputra2615@student.unri.ac.id

How to Cite: Bangun, Bunari, & Fikri. (2026). Construction of The Tengku Agung Sultanah Latifah Bridge and Its Impact On Siak Regency (2001-2011). doi: 10.36526/js.v3i2.6006

Received : 04-08-2025
Revised : 25-12-2025
Accepted : 10-01-2026

Keywords

History of bridge construction,
Tengku Agung Sultanah Latifah Bridge,
Siak Regency,
Siak River,
Transportation and access,
Economic and social impact

Abstract

This study investigates the historical context and multifaceted impact of the Tengku Agung Sultanah Latifah Bridge construction in Siak Regency, Riau, spanning the period from 2001 to 2011. Prior to its construction, the inhabitants of Siak Sri Indrapura City encountered significant challenges stemming from restricted access across the Siak River, a crucial national waterway and primary transportation artery. Dependence on pontoons, ferries, or traditional wooden canoes led to extensive queues, prolonged travel times, and inherent safety hazards, particularly for schoolchildren. These impediments severely hindered economic and social development, causing Siak to lag behind other districts and earning it the moniker of a 'ghost town'. In response to these pressing issues, the inaugural Regent of Siak, Arwin AS, initiated the bridge project in 2002. The undertaking encountered considerable resistance, including opposition from the central government and legal disputes from shipping companies concerned about navigational disruptions. Nevertheless, through persistent efforts by the local government, the bridge was successfully completed and formally inaugurated in 2007 by President Susilo Bambang Yudhoyono. Currently, the Tengku Agung Sultanah Latifah Bridge functions not merely as critical infrastructure, enhancing transportation and stimulating economic activity, but also as a prominent tourist destination. This research specifically aims to delineate the community's challenges before the bridge's construction, detail the construction process, and analyze its profound impact on the developmental trajectory of Siak Regency.

PENDAHULUAN

Siak, sebuah kabupaten di Provinsi Riau, memiliki sejarah panjang Kerajaan Melayu, yang dibuktikan dengan keberadaan Istana Asseraya, didirikan oleh Raja Kecik. Kota Siak Sri Indrapura terletak di tepi Sungai Siak, salah satu sungai terdalam di Indonesia dengan panjang 300 km. Sungai Siak membentang dari hulu hingga hilir di wilayah Riau, melewati beberapa kabupaten/kota seperti Rokan Hulu, Kampar, Pekanbaru, Bengkalis, dan Siak. Sungai ini juga berfungsi sebagai jalur transportasi.

Sungai Siak merupakan sungai strategis nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, karena peran pentingnya dalam perkembangan wilayah dan ekonomi lokal, regional, maupun nasional. Dahulu, sungai ini adalah jalur transportasi utama bagi Kerajaan Siak. Sebelum

adanya Jembatan Tengku Latifah, masyarakat Siak kesulitan menyeberangi sungai dengan kendaraan darat, harus mengandalkan ponton atau kapal feri yang seringkali mengharuskan antrean panjang karena keterbatasan jumlah kapal. Hal ini menyebabkan perjalanan darat memakan waktu lama. Cuaca buruk juga bisa menunda penyeberangan. Anak-anak sekolah pun menghadapi kesulitan akses, seringkali harus mengantre feri atau menaiki sampan kayu yang berisiko saat air pasang dan arus deras.

Ketiadaan jembatan juga menghambat aktivitas ekonomi dan perdagangan, membuat harga barang mahal. Masyarakat juga harus membayar biaya penyeberangan. Kondisi ini menyebabkan Siak sulit berkembang dibandingkan kecamatan lain seperti Dayun, Tualang, dan Kerinci, bahkan dianggap sebagai "tanah buangan" atau "kota mati". Aktivitas sosial dan silaturahmi pun terhambat, bergantung pada sampan kayu atau kapal feri yang disewa mahal.

Melihat kondisi ini, Bupati Siak pertama, Arwin AS, berinisiatif membangun Jembatan Tengku Latifah pada tahun 2002. Pembangunan jembatan ini menghadapi banyak rintangan, termasuk penolakan dari pemerintah pusat dan gugatan dari perusahaan pelayaran. Gugatan tersebut didasarkan pada dugaan bahwa pembangunan jembatan mengganggu sarana navigasi pelayaran dan alur sungai, melanggar UU No. 21 Tahun 1992 tentang pelayaran dan Pasal 192 KUHP. Namun, berkat perjuangan pemerintah Kabupaten Siak, jembatan tersebut akhirnya selesai dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Jembatan Tengku Latifah kini juga menjadi objek pariwisata yang menarik minat masyarakat Siak maupun luar Siak. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami kesulitan masyarakat sebelum jembatan, proses pembangunannya, dan dampaknya bagi Kabupaten Siak dari tahun 2001 hingga 2011.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut peneliti mengangkat tema penelitian yang berjudul: ***"Pembangunan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah dan Dampaknya Bagi Kabupaten Siak (2001-2011)"***

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah atau historis yaitu metode penelitian yang bertujuan membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Louis Gottschalk menjelaskan metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang autentik dan dapat dipercaya. Serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.

Tahap Heuristik adalah mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Tahap selanjutnya adalah Verifikasi Pada tahap ini, setelah semua sumber yang didapatkan terkumpul, maka tahap berikutnya adalah pengujian terhadap sumber yang telah didapat.

Pada tahap interpretasi Setelah mengumpulkan dan telah diverifikasi, maka selanjutnya peneliti melakukan tahapan interpretasi atau yang kita kenal dengan penafsiran data atau sumber. Pada penelitian ini setelah peneliti menyesuaikan antara hasil wawancara dengan sumber tertulis yang telah didapatkan oleh peneliti maka selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dan akan menafsirkan sumber-sumber yang berkaitan dengan sejarah Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah. Tahap terakhir dari metode sejarah adalah Historiografi. Historiografi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *History* atau *Historia* yang berarti sejarah, dan *grafi* yang berarti deskripsi atau penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah

Kabupaten Siak memiliki sejarah sebagai pusat Kerajaan Melayu yang didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil (Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah). Pusat kerajaan ini sering berpindah-pindah, dari Buntan ke Mempura, lalu ke Senapelan Pekanbaru, dan kembali lagi ke Mempura.

Kerajaan Siak memiliki istana megah bernama Istana Asserayyah Hasyimiah, atau Istana Matahari Timur. Kesultanan Siak berdiri dari tahun 1723 M hingga 1946 M.

Pada tanggal 28 November 1946, Sultan Siak Sri Indrapura mengirim telegram kepada Presiden Soekarno yang menyatakan kesetiaan dan bergabung dengan Republik Indonesia. Sikap ini didukung penuh oleh rakyat Siak. Sultan Syarif Kasim II, yang menyerahkan Kerajaan Siak kepada Bung Karno setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, juga menyerahkan harta kerajaan senilai 12 juta golden atau setara dengan 1000 triliun rupiah kepada negara. Pada tahun 1946, Sultan Syarif Kasim II bertemu dengan Gubernur Sumatera, T.M. Hasan, di Medan untuk membicarakan penyerahan kekuasaannya kepada pemerintah Republik Indonesia, yang secara resmi menjadikan Kerajaan Siak bagian dari RI. Atas pengorbanannya, Sultan Syarif Kasim II menerima piagam tanda kehormatan Bintang dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998.

Awalnya, Kabupaten Siak adalah sebuah kecamatan di bawah Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 1999, melalui UU No. 53 Tahun 1999, Siak ditetapkan menjadi kabupaten dengan tiga kecamatan awal: Siak, Minas, dan Sungai Apit. Hingga tahun 2008, Kabupaten Siak telah dimekarkan menjadi 14 kecamatan. Bupati pertama Kabupaten Siak adalah Arwin AS.

Pada awal pembentukannya di tahun 1999, ibukota Kabupaten Siak, Siak Sri Indrapura, sangat tertinggal dibandingkan daerah lain, bahkan dibandingkan kecamatannya sendiri. Hal ini disebabkan oleh Sungai Siak yang memisahkan wilayah ibukota, sehingga akses utama adalah melalui jalur air menggunakan kapal feri. Tarif feri bervariasi, dari Rp 1.000,00 untuk perorangan hingga Rp 2.000,00 – Rp 5.000,00 untuk kendaraan bermotor atau mobil, dan jasa penyeberangan menggunakan sampan bisa lebih mahal. Kapal feri ini adalah satu-satunya akses penyeberangan, seringkali menyebabkan antrean panjang dan penyeberangan tergantung pada kondisi cuaca. Kesulitan akses ini, termasuk bagi siswa yang harus mengantri dan membayar ongkos, serta tidak bisa bersekolah saat cuaca buruk, menjadi masalah serius yang menghambat perkembangan Kabupaten Siak.

Melihat kondisi ini, Bupati Arwin AS bertekad membangun sebuah jembatan. Dari hasil wawancara bersama Bapak Arwin AS, menjelaskan bahwa jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi akses penyeberangan, tetapi juga diharapkan menjadi simbol kemegahan dan ikon Kabupaten Siak, melambangkan kebesaran sejarah Kerajaan Melayu Siak. Rangkaian kejadian inilah yang melatarbelakangi pembangunan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah.

Proses dan Hambatan Pembangunan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah

Pembangunan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah di Kabupaten Siak dimulai perencanaannya pada tahun 2001 oleh Pemkab Siak, yang saat itu dipimpin oleh Bupati Arwin AS. Tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), termasuk Ir. Jodi Firmansyah, MSE., Ph. D., diundang untuk merancang jembatan tersebut. Desain awal jembatan adalah sistem *cabl-stayed* dengan tinggi 20 meter di atas permukaan air pasang, panjang 1.190 meter, dan lebar 16,95 meter, dengan perkiraan biaya Rp 250 miliar. Anggaran ini disahkan oleh DPRD Kabupaten Siak pada tahun 2002.

Pada sosialisasi awal pembangunan jembatan pada 10 Juli 2002, rencana ketinggian 20 meter ditentang oleh berbagai pihak yang meminta agar ketinggiannya ditambah menjadi 30 meter untuk mengakomodasi kapal-kapal besar yang melintasi Sungai Siak. Bupati Arwin AS menolak usulan ini karena akan mempengaruhi biaya dan desain jembatan. Setelah diskusi panjang, disepakati ketinggian jembatan menjadi 23 meter atas saran Gubernur Riau Saleh Djasit.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME. (Kasubdin Pengairan Dinas PU Kabupaten Siak tahun 2002) beliau menjelaskan bahwa pembangunan jembatan dilakukan dengan pembangunan sekaligus dari sisi selatan dan utara. Pada sisi selatan pembangunan jembatan akan dilakukan oleh perusahaan PT Utama Karya dan di sisi utara akan dibangun oleh PT Pembangunan Perumahan. Pembangunan ini diawasi oleh MK LPPM ITB. Kontrak kerja PT Utama Karya dibuat dalam surat dengan no kontrak 01/ 620/BM-PJS/ 2002.

Dalam kontrak tersebut tertera anggaran dana pembangunan jembatan sisi Selatan dengan dana yang ditanggung oleh APBD Kabupaten Siak.

Meskipun sudah disepakati ketinggian 23 meter, pada tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Siak menerima surat dari Menteri Dalam Negeri yang meminta perubahan tinggi jembatan menjadi 30 meter dan bahkan penghentian pembangunan jika tidak diubah. Bupati Arwin AS menolak penghentian karena pembangunan sudah mencapai hampir 60 persen. Permasalahan ini berlanjut hingga gugatan hukum oleh PT Manunggal Sejati, sebuah perusahaan pelayaran, yang menggugat Pemkab Siak karena dianggap melanggar UU Pelayaran dengan ketinggian jembatan 23 meter di sungai yang merupakan jalur pelayaran internasional. Gugatan ini menyebabkan Bupati Siak ditetapkan sebagai tersangka. Akibatnya, pembangunan jembatan terpaksa dihentikan pada 15 Januari 2005.

Selama penghentian, Pemkab Siak bernegosiasi dengan pemerintah pusat, dan masyarakat Siak juga berdemonstrasi menuntut kelanjutan pembangunan. Setelah pergantian Presiden RI dan Menteri Perhubungan (dari Agum Gumelar ke Hatta Radjasa) pada tahun 2004, Bupati Arwin AS kembali mengajukan permohonan pembangunan jembatan. Pada Desember 2005, Menteri Perhubungan Hatta Radjasa memberikan izin resmi untuk melanjutkan pembangunan jembatan dengan tinggi 23 meter. Pembangunan dilanjutkan dengan tahap pengecoran *pylon*, pemasangan *Truss Sourcing* pada *App span*, pemasangan *Bekisting*, dan pemasangan *Cable Stayed* yang dipesan dari luar negeri. Selanjutnya, dilakukan penyambungan kedua sisi jembatan menggunakan *Traveller* dan *Temporary Tower*.

Pada awal tahun 2007, pembangunan jembatan hampir selesai, dan Bupati Arwin AS mengusulkan penambahan bangunan di atas menara tiang jembatan sebagai menara pandang, lengkap dengan lift. Pada saat yang sama, proses penamaan jembatan melibatkan masyarakat. Dari hasil wawancara bersama Datuk Sri H.Wan Said (Ketua LAM Siak Kabupaten Siak) beliau menjelaskan bahwa penamaan jembatan dilakukan dengan melalui sistem undian. Nama yang terpilih adalah "Tengku Agung Sultanah Latifah", diambil dari nama permaisuri Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Kasim II. Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Agustus 2007. Peresmian ini diabadikan dalam sebuah prasasti yang berisi tanda tangan Presiden RI.

Dampak Pembangunan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Bagi Kabupaten Siak

Pembangunan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah di Kabupaten Siak memiliki dampak signifikan terhadap aspek transportasi, ekonomi, dan sosial masyarakat di Kabupaten Siak.

Transportasi: Berdasarkan hasil wawancara bersama Andika sebagai staf lalu lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Siak tahun 2006. Beliau menjelaskan bahwa Sebelum pembangunan jembatan, masyarakat Kabupaten Siak, terutama dari 14 kecamatan, kesulitan mengakses ibukota kabupaten karena harus menyeberangi Sungai Siak menggunakan kapal feri yang berbayar dan seringkali menimbulkan antrean panjang. Selain itu, operasional feri bergantung pada kondisi cuaca, sehingga sering terhenti saat cuaca buruk. Kemudahan transportasi sangat penting untuk kemajuan suatu daerah karena meningkatkan konektivitas dan mobilitas. Setelah adanya Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah (disahkan tahun 2007), akses transportasi darat menjadi jauh lebih mudah bagi masyarakat Kabupaten Siak. Arus lalu lintas di jembatan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan penyeberangan feri sebelumnya. Data menunjukkan peningkatan 60% masyarakat yang melintasi jembatan setiap tahun dari 2007 hingga 2011, dibandingkan hanya sekitar 25% yang menggunakan feri sebelumnya.

Ekonomi: Pembangunan infrastruktur, seperti jembatan, merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator utama untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebelum jembatan dibangun, harga barang-barang kebutuhan sehari-hari di Kabupaten Siak, khususnya di ibukota, menjadi mahal karena sulitnya akses distribusi. Pedagang juga mengalami

kesulitan karena biaya penyeberangan dan ketergantungan pada sampan tradisional atau feri yang memakan waktu dan terpengaruh kondisi cuaca. Setelah pembangunan jembatan, harga barang menjadi normal karena akses distribusi yang lebih mudah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Siak memanfaatkan jembatan sebagai objek pariwisata, yang turut membantu perekonomian masyarakat. PDRB Kabupaten Siak mengalami kenaikan signifikan setelah jembatan diresmikan pada tahun 2007. Angka PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp10.103.624,32 juta pada tahun 2006 menjadi Rp13.083.922,71 juta pada tahun 2007. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak pada tahun 2007 tercatat sebesar 7,54%. Peningkatan PDRB terus berlanjut hingga tahun 2009 dan 2011, menunjukkan dampak positif keberadaan jembatan.

Sosial: Pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif pada kehidupan sosial masyarakat, termasuk pembangunan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah.

- **Pendidikan:** Sebelum jembatan, anak-anak sekolah kesulitan mengakses pendidikan di seberang sungai khususnya bagi anak-anak yang berada di ibukota Kabupaten Siak. Karena siswa yang tinggal di Ibukota Kabupaten Siak dulu, harus mengantri feri atau menggunakan sampan kayu yang berisiko tinggi saat air pasang atau arus deras. Setelah adanya jembatan, siswa lebih mudah mengakses sekolah mereka, tidak perlu khawatir dengan antrean atau cuaca buruk.
- **Kesehatan:** Akses jalan yang baik sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal kesehatan. Sebelum jembatan, masyarakat dari kecamatan-kecamatan yang berseberangan dengan RSUD Tengku Rafi'an, seperti Koto Gasib dan Mempura, mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan darurat karena terhambat penyeberangan feri yang memakan waktu dan berisiko membahayakan nyawa. Setelah jembatan dibangun, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengakses RSUD Kabupaten Siak.

PENUTUP

Siak Sri Indrapura, terletak di tepi Sungai Siak, salah satu sungai terdalam di Indonesia dengan panjang 300 km. Sungai Siak ini melintasi beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Siak. Keberadaan Sungai Siak memberikan manfaat sekaligus kesulitan bagi masyarakat Kabupaten Siak karena membelah wilayah menjadi dua bagian, selatan dan utara. Sebelumnya, penyeberangan dilakukan menggunakan sampan dan kapal feri, yang memerlukan pembayaran tiket, antrean, dan terbatasnya muatan, serta bergantung pada kondisi cuaca. Kesulitan akses penyeberangan ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat di bidang transportasi, ekonomi, dan sosial.

Menanggapi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Siak merencanakan pembangunan jembatan yang dimulai pada tahun 2001. Ir. Jodi Firmansyah, MSE., Ph.D. dari Institut Teknologi Bandung dipanggil sebagai konsultan untuk merancang bentuk jembatan. Sosialisasi rencana pembangunan jembatan pada tahun 2002 mendapatkan banyak penolakan, termasuk dari Gubernur Riau. Namun, Bupati Siak tetap bersikeras, dan setelah diskusi panjang, pembangunan dilanjutkan dengan perubahan ketinggian jembatan dari rencana awal 20 meter menjadi 23 meter di atas permukaan air pasang. Pembangunan jembatan dimulai pada 31 Desember 2002 dengan peletakan pancang tiang. Selama proses pembangunan, banyak gugatan yang menyebabkan pembangunan sempat terhenti pada tahun 2004, namun dilanjutkan kembali pada tahun 2005. Jembatan rampung pada tahun 2007 dan diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan nama Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah. Pembangunan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Siak di bidang transportasi, ekonomi, dan sosial, mempermudah akses penyeberangan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembangunan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah dan dampaknya bagi Kabupaten Siak (2001-2011), berikut adalah beberapa saran meliputi:

1. Optimalisasi Pemeliharaan Infrastruktur

Mengingat jembatan ini merupakan infrastruktur vital yang menghubungkan wilayah Utara dan Selatan serta jalur transportasi strategis nasional, Pemerintah Kabupaten Siak perlu melakukan perawatan berkala secara intensif. Hal ini penting untuk memastikan keselamatan pengguna jalan dan menjaga agar jembatan tetap berfungsi optimal sebagai urat nadi ekonomi dan mobilitas masyarakat dalam jangka panjang.

2. Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu

Penelitian menunjukkan bahwa jembatan ini telah menjadi objek pariwisata yang menarik minat masyarakat. Pemerintah daerah disarankan untuk Meningkatkan fasilitas pendukung di sekitar menara pandang dan lift jembatan agar menjadi destinasi wisata yang lebih profesional. Mengintegrasikan paket wisata antara jembatan dengan situs sejarah lain, seperti Istana Asserayyah Hasyimiah (Istana Matahari Timur), untuk memperkuat identitas Siak sebagai pusat kebudayaan Melayu.

3. Pelestarian Nilai Sejarah dan Edukasi

Karena jembatan ini melambangkan kebesaran sejarah Kerajaan Melayu Siak dan perjuangan pembangunan yang penuh tantangan, disarankan agar pemerintah membuat dokumentasi edukasi atau museum mini di area jembatan. Hal ini bertujuan agar generasi muda memahami nilai sejarah di balik nama "Tengku Agung Sultanah Latifah" serta perjuangan mengatasi hambatan hukum dan teknis selama pembangunannya.

4. Rekomendasi untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk Mengkaji dampak ekonomi jangka panjang jembatan ini setelah tahun 2011 (era setelah penelitian ini) untuk melihat kesinambungan pertumbuhan PDRB. Meneliti dampak pembangunan jembatan terhadap tata ruang kota dan pola pemukiman di sekitar wilayah yang dulunya terisolasi.

Adapun kelemahan pada penelitian ini adalah pada sumber arsip dan referensi yang berbentuk tulisan. Pengarsipan di pemerintah Kabupaten Siak mengenai pembangunan jembatan ini masih terbilang kurang detail dari segi pembukuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asril, Asril. "Raja Kecil Pendiri Kerajaan Siak Sri Indrapura." *Lentera: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Budaya dan Sosial*, vol. 1, no. 02, 2009, pp. 50-68.
- Afni Zulkifli(2011). *Aku Untuk Siak"Setapak Langkah Menoreh Sejarah"*. PT.Bintang Sempurna.hlm.49.
- Amaluddin. *Perspektif Historis Pendidikan karakter di Indonesia dan aktualisasinya bagi generasi milenial.Jurnal Prosiding Pendidikan*. Vol. 5.no. 1. 2023.
- Badri Yatim.*Historiografi Islam* (Jakarta:Logos,1995).hlm.5.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak 2001.
- Dudung Abdurrahman.(2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*,Yogyakarta:Ar-ruzz Media,hlm.53-54.
- Hasil wawancara Bapak Arwin. AS.(Mantan Bupati Kabupaten Siak 2001- 2011) pada tanggal 14 februari 2025.
- Hasil wawancara Datuk Sri H.Wan Said (Ketua LAM Siak Kabupaten Siak.) pada tanggal 20 januari 2025
- Hasil wawancara Bapak Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME. (Kasubid Pengairan Dinas PU Kabupaten Siak tahun 2002) pada tanggal 16 Maret 2025.
- Hasil Wawancara Bapak Andika (Staf Dinas Perhubungan bagian lalulintas 2006-- sekarang) Pada Tanggal 29 Oktober 2024.
- Imam suprayogi, *Strategi Pengendalian Pencemaran Sungai Siak yang Berkelanjutan*

Menggunakan Pendekatan Multi Criteria Decision Making (MCDM), Dinamika Lingkungan Indonesia, Vol. 9, No.2 Juli 2022.

Imas Emalia. (2006). *Historiografi Indonesia*. Jakarta Selatan: UIN Jakarta Press. hlm.6.

Kamaruddin (2021). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 9. No. 3

Murni Wahyuni (2020). Siak Masa Revolusi (1945- 1949). *Yupa: Historical Studies Journal*. Vol. 4. No. 1

Nugroho Notosusanto, *Metode Penelitian Sejarah Kontemporer Suatu Pengalaman*, (Jakarta: Intidayu Press, 1984) hlm. 10.

Ridho Kurniawan (2022). "Mengenal Istana Siak Sri Indra Pura, Salah satu Kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di Pulau Sumatera". Artikel Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

Uno, H. B. (2011). *Teori motivasi dan pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.